

ABSTRAK

Yudis Fajar Ramadhan (01656220122)

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS

(ix + 130 halaman)

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Notaris dilakukan secara berkesinambungan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Tesis ini akan membahas pengaturan tentang Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Majelis Pengawas Daerah kewenangannya sebatas mengawasi dan memeriksa, kemudian Majelis Pengawas Wilayah yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, dan apabila ada banding atas sanksi dapat diajukan kepada Majelis Pengawas Pusat. Pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kasus ini menyatakan bahwa, Majelis Pengawas Notaris mendapat pelimpahan wewenang secara atributif dan memiliki sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Program Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, sehingga Majelis Pengawas Notaris dikatakan pula sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusannya merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.

Referensi : 79 (1964-2023)

ABSTRACT

Yudis Fajar Ramadhan (01656220122)

THE AUTHORITY OF THE STATE ADMINISTRATIVE COURT IN CANCELING THE DECREE OF THE REGIONAL SUPERVISORY BOARD OF NOTARIES

(ix + 130 pages)

Supervision conducted by the Government on Notary is carried out on an ongoing basis, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia authorizes the Notary Supervisory Council to conduct supervision and guidance of Notary. This thesis will discuss the regulation of the Notary Supervisory Council in imposing sanctions and the authority of the State Administrative Court. In this research, the author uses a juridical-normative research method that combines a normative legal approach to legislation and case studies through court decisions. The results showed that, the Regional Supervisory Assembly has the authority to supervise and examine, then the Regional Supervisory Assembly has the authority to impose sanctions, and if there is an appeal against sanctions, it can be submitted to the Central Supervisory Assembly. The legal considerations of the State Administrative Court in this case state that the Notary Council has attributive authority and has a source of funding that comes from the Program Budget of the Directorate General of General Legal Administration, so that the Notary Supervisory Council is also said to be a State Administrative Official and its decision is the object of a State Administrative dispute.

Reference : 79 (1964-2023)